



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 22**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan, perlu diberikan honor setiap bulannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2011.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dibawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat PTY adalah pegawai dibawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat oleh suatu yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas yayasan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
7. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai dibawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri atau swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah pegawai dibawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat oleh suatu yayasan untuk jangka waktu tetap guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri atau swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### **BAB II**

#### **BESARAN HONORARIUM**

##### **Pasal 2**

- (1) Besaran pemberian honorarium PTT, PTY, GTT, dan GTY ditentukan sebagai berikut :
  - a. PTT, PTY di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. PTT, PTY di Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta dan di UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

- c. GTT, GTY di Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak bulan Januari 2011.

### **BAB III**

#### **KRITERIA PENERIMA HONORARIUM**

##### **Pasal 3**

- (1) Kriteria PTT, PTY yang dapat menerima honorarium adalah sebagai berikut :
- a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) atau Perangkat Desa;
  - b. PTT yang bertugas di sekolah negeri atau swasta wajib mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) berada di sekolah dibawah binaan/naungan Dinas Pendidikan;
  - c. usia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2011;
  - d. mulai melaksanakan tugas sebagai PTT, PTY di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelum tanggal 18 Februari 2005; dan
  - e. latar belakang pendidikan paling rendah SD atau Paket A.
- (2) Kriteria GTT, GTY yang dapat menerima honorarium adalah sebagai berikut :
- a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, PNS/ TNI/ Polri atau Perangkat Desa;
  - b. mempunyai NUPTK dengan Satminkal berada di sekolah di bawah binaan/naungan Dinas Pendidikan;

- c. bukan penerima Tunjangan Profesi atau Tunjangan Guru Daerah Khusus;
- d. mengajar bukan mata pelajaran ekstrakurikuler;
- e. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2011;
- f. mulai melaksanakan tugas sebagai GTT, GTY di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelum tanggal 18 Februari 2005;
- g. pendidikan paling rendah, dengan ketentuan :
  - 1) jenjang SMA/SMK paling rendah D III/Sarjana Muda;
  - 2) jenjang SMP paling rendah D I/PGSLP; dan
  - 3) jenjang TK dan SD paling rendah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Olah Raga (SGO) atau Kursus Pendidikan Guru.

### **BAB IV**

#### **SUMBER DANA**

##### **Pasal 4**

Honorarium PTT, PTY, GTT, dan GTY bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 21 Maret 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 21 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 22**